



MEMODERASIKAH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016)

Mohklas¹, Devi Inanta Purwati²
Mohklas1970@gmail.com

STIE Pelita Nusantara

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2018
Disetujui Maret 2019
Dipublikasikan Juli 2019

Kata Kunci:

*Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus,
Belanja Modal,
Pertumbuhan Ekonomi*

*Keywords: Regional
Original Revenue,
General Allocation
Funds, Special Alokas
Funds, Capital
Expenditures, Economic
Growth*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal yang dimoderasi dengan Pertumbuhan Ekonomi. Implikasi manajerialnya adalah sebagai sumbang saran dalam konsep secara ilmiah bagi Pemerinta Daerah /Kabupaten Kota di Jawa Tengah, khusus dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik dalam menentukan kebijakan belanja modal.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel dimana pada PAD, DAU dan DAK menjadi variabel bebas sedangkan BM variabel terikat, sedangkan PE sebagai variabel moderat. Teknik populasi dan sampel, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan metode sampling jenuh, jumlah sampel: 175 data. Data penelitian ini berupa data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB provinsi Jawa Tengah tahun 2012- 2016. Data yang telah dikumpulkan dianalisis pengujian hipotesis dengan uji Moderated Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitain ini memberikan bukti bahwa; PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PE tidak memoderasi hubungan antara PAD, DAU namun dapat memoderasi DAK dengan BM.

Abstract

Capital expenditure has an important role for the Regional Government, with the existence of the Capital Expenditures the Regional Government can improve public services and allocate them to the main objectives; welfare of the community. One of the efforts is; by optimizing the potential for PAD, so the proportion of Capital Expenditures is considered productive. Optimizing the receipt of PAD should be supported, pursued by regional governments by improving the quality of public services. PAD is one component of the source of state financial revenues in addition to other revenues, which can be in the form of; DAU and DAK. Regional autonomy is required to be more independent in managing the household budget, by being more independent in managing its economic resources which will add PAD. But the central government also continues to support local governments through DAU and DAK funds.

In general, this study aims to test, analyze the influence of PAD, DAU and DAK on the BM of Regency / City Governments in Central Java with the PE variable dimediator. So that it can be seen whether PE can moderate in influencing BM. In particular, this study aims to provide input from District / City Governments in Central Java, in allocating PAD, DAU and DAK to BM.

The variables in this study consist of 5 (five) variables where in PAD, DAU and DAK are independent variables while BM is the dependent variable, while PE is a moderate variable.

Population and sample techniques, all regencies / cities in Central Java Province, using saturated sampling methods, number of samples: 175 data. This research data is in the form of secondary data in the form of APBD Realization Report and provincial Central Java GRDP table in 2012-2016. The collected data is analyzed first by testing the classical assumptions then testing the hypotheses using the Moderated Regression Analysis (MRA) test.

□ Alamat korespondensi:
Jl. Sidodadi Timur Nomor 24- Dr. Cipto
Semarang-Indonesia 50125
Kampus UPGRIS, Gedung Pusat
Email : mohklas1970@gmail.com

E-ISSN (2621-9565)
ISSN (2621-850X)

PENDAHULUAN

Di era reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban kedua aspek tersebut, dalam pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola anggaran rumah tangganya, meski pemerintah dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan sumber-sumber ekonominya yang nantinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pemerintah pusat juga terus mendukung pemerintah daerah melalui dana transfer ke pemerintah daerah yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana

Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Sedangkan daerah-daerah tersebut belum tentu membutuhkan sesuai dengan permintaannya dan akhirnya tidak efektif dalam penganggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2004), belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja

pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja atau pengeluaran pada periode anggaran daerah yang termasuk dalam Belanja Langsung. Belanja sendiri tidak lepas dari besarnya pendapatan yang di dapat oleh pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, dan

juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif.

Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Diberlakukannya otonomi daerah juga menciptakan perbedaan potensi keuangan daerah sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan mendukung otonomi daerah maka Pemerintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain DAU terdapat juga jenis dana perimbangan lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011) dalam Wandira (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) serta Situngkir (2009) membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang

dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat Putro (2010) dalam Jaya dan Dwirandra (2014). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan maupun penambahan aset tetap diperoleh melalui pengalokasian anggaran belanja modal.

Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian oleh Sularno (2013) memperoleh hasil bahwa PDRB

berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Belanja Modal yang tinggi akan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan analisa dalam pengalokasiannya.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan

program pengeluaran tertentu. Adapun Tujuan dari transfer adalah sebagai penutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan kemampuan fiskal antara daerah untuk daerah sehingga dana alokasi umum setiap daerahnya tidak pernah sama besarnya (Munir, 2003). Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam rangka S pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Deddi Nordiawan, Iswahyudi & Maulidah Rahmawati (2008) menjelaskan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung

oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011) dalam Arbie (2013). Penelitian yang dilakukan Jiwatami (2013) dan Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik untuk bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor

untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu (2005) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hipotesis

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

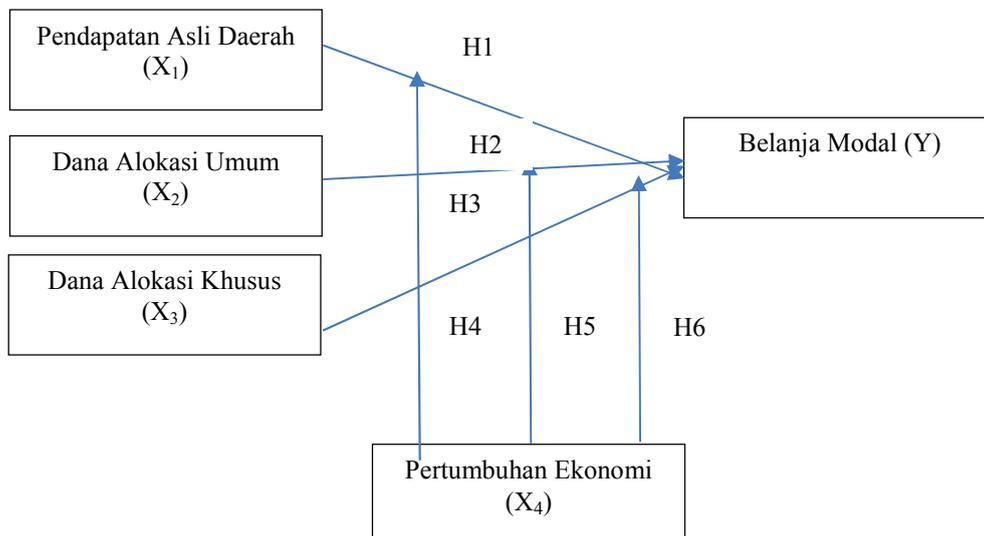
H2: Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

H3: Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

H4: Diduga Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

H5: Diduga Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

H6: Diduga Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal.



METODE PENELITIAN

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam peneliian ini 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016. Pengambilan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tabel Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016. Sampel dalam penelian ini 175 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016, dengan metode sampling jenuh yaitu; seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data penelitian ini diperoleh dari Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://djpk.depkeu.go.id>), serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (<http://bappeda.jatengprov.go.id>).

Uji Hipotesis dan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating dengan uji statistik melalui Analisis Regresi Linier Berganda, dengan persamaan regres berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1.X_4 + \beta_5 X_2.X_4 + \beta_6 X_3.X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefisien Regresi

X_1, X_2, X_3 = Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus

X_4 = Variabel *moderating* yaitu Pertumbuhan Ekonomi

ε = Standart error

Untuk menguji hipotesis model regresi dengan variabel moderasi digunakan uji interaksi. Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2011).

Uji Hipotesis dan Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderating.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
3.565	.753		4.734	.000
.167	.035	.288	4.752	.000
.314	.059	.336	5.292	.000
.204	.046	.280	4.390	.000

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

**Uji Interaksi
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.662	.285		33.943	.000
MODERATING1 (X1.X4)	.005	.005	.133	1.031	.304
MODERATING2 (X2.X4)	-.002	.007	-.052	-.325	.746
MODERATING3 (X3.X4)	.019	.007	.369	2.578	.011

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: *Output SPSS 17.2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. PAD (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan thitung $4,752 >$ dari ttabel $1,65387$, maka dapat di simpulkan H1 diterima.
- b. DAU (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan thitung $5,292 >$ dari ttabel $1,65387$, maka dapat di simpulkan H2 diterima.
- c. DAK (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan thitung $4,390 >$ dari ttabel $1,65387$, maka dapat di simpulkan H3 diterima.
- d. Moderated Regresion Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,304 > 0,05$. Maka hal ini menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
- e. Moderated Regresion Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,746 > 0,05$. Maka hal ini menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi

atau memperkuat hubungan pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja modal.

- f. Metode Moderated Regresion Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$. Maka hal ini menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau memperkuat hubungan pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) Terhadap Belanja Modal (H1)

PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini dikarenakan jika PAD yang tinggi pada PEMDA (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) akan lebih luas, dan fleksibel dalam mengalokasikan penggunaan dananya untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, maupun lainnya.

Otonomi dan Desentralisasi Daerah berdampak pada Pemda harus mau dan mampu merencanakan dan manage sumber-sumber penerimaan dana dari daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhannya. Hal ini dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Desentralisasi daerah dalam merancang

dan mengelola keuangannya sebagai sumber potensi pendapatan yang dominan, ini akan memberikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar Pemda Indonesia bersumber dari pemungutan pajak dan retribusi daerah (Halim, 2014).

Pengaruh positif PAD kepada Belanja Modal dapat diinterpretasikan jika PAD semakin maksimum, maka Belanja Modalnya akan semakin maksimum juga yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam meningkatkan fasilitas umum dengan meningkatnya sarana prasarana melalui pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilaksanakan oleh-Gounder et al., (2007), Lucky (2013) dan Abba (2015) yang menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal. Penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Purbarini and Masjojo (2015) dan Tuasikal (2008) menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) Terhadap Belanja Modal (H2)

Hasil penelitian ini adalah DAU berpengaruh positif signifikan kepada belanja modal, hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan

pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional dan dipergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal.

DAU yang semakin besar diberikan dari pusat, maka Belanja Modal akan semakin besar yang dianggarkan (Novianto dan Hanafiah, 2015). Dengan hasil temuan ini menunjukkan pemda berketergantungan dengan dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah dalam mendanai kegiatan daerahnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sumarsono dan Rahmawati (2017), Abdillah dan Mursinto (2016) bahwa, DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Juga oleh Tuasikal (2008), Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X3) Terhadap Belanja Modal (H3)

Pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja modal dapat memberikan penjelasan bahwa, Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan

melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada PEMDA (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional sehingga mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Pemberian bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus untuk pemerintah daerah salah satu tujuannya yaitu membiayai kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik terutamanya infrastruktur (Novianto dan Hanafiah, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sugiyanta (2016) dan Novianto dan Hanafiah (2015) yang menemukan bahwa DAK positif terhadap Belanja Modal. Juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013), dan Nuarisa (2013) dengan menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (H4)

Moderasi pertama antara PAD dengan PE memiliki nilai signifikan sebesar $0,304 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa PE tidak memoderasi pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal. Hal ini diasumsikan, meskipun dengan

adanya PE yang tinggi PEMDA justru menggunakan hasil PAD yang lebih besar untuk memenuhi belanja modal maupun lainnya.

Hasil penelitian Panji dan Dwirandra (2012) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Begitu pula hasil penelitian ini bahwa, pertumbuhan ekonomi belum atau tidak memperkuat pengaruhnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh; Sugiardi dan Supadmi (2014), bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas Pemda akan meningkat pula.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, oleh karenanya kedua-duanya berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), maka sangat relevan jika pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (MB).

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (X5)

Moderasi kedua antara DAU dengan PE memiliki nilai signifikan sebesar $0,746 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, PE tidak memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.

DAU yang jumlahnya signifikan akan mempengaruhi jumlah belanja modal pada suatu daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan memberikan stimulan pada peningkatan pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Pendapatan penduduk akan berdampak pada pula pada pendapatan per kapita. Karena masing-masing variabel mempunyai fungsi yang berbeda, maka ada relevansinya jika pertumbuhan ekonomi kurang atau tidak memperkuat pengaruhnya antara DAU dengan BM.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (X6)

Moderasi ketiga antara DAK dengan PE memiliki nilai tingkat signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan

antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Daerah yang Pertumbuhan Ekonominya baik, maka perkembangan dari kegiatan perekonomian tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat (Putro, 2010) dalam Jaya dan Dwirandra (2014). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah kepada Pemda setempat untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan maupun penambahan aset tetap diperoleh melalui pengalokasian anggaran belanja modal.

Sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang,

dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011) dalam Arbie (2013).

Dengan demikian maka sangat relevan jika PE dapat memperkuat pengaruhnya antara DAK dengan BM pada suatu Pemerintah daerah baik itu tingkat Kabupaten maupun Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ardhani, 2011) dalam Wandira (2013), Ramirez dan Esfahani (1999) dalam Maqin (2011) membuktikan bahwa infrastruktur mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula dana alokasi khusus yang diperuntukan belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dan analisis penelitian yang merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi 0,000.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja modal, dengan tingkat signifikansi 0,000 .

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal tingkat signifikansi 0,000 .
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, nilai signifikan 0,304.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal, nilai signifikannya 0,746.
6. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal, nilai signifikannya 0,011.

SARAN

1. Hasil penelitian ini, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, maka disarankan hendaknya masing-masing daerah dapat menggali potensi penerimaan daerahnya secara maksimum.
2. Pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dari sektor-sektor ekonomi daerah, guna meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga lebih mandiri secara financial dalam mendanai seluruh aktivitasnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal,

maka hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pusat ke daerah, dan sebaliknya daerah harus dapat memanfaatkan dengan baik, serta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

4. Objek penelitian ini cakupannya hanya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, untuk peneliti mendatang disarankan bisa ditambah dengan Kabupaten/Kota Provinsi yang lain, supaya hasilnya lebih memadai.
5. Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri PAD, DAU dan DAK serta PE sebagai moderat terhadap BM, disarankan untuk peneliti mendatang bisa menambahkan misalnya Angka Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Investasi sehingga dapat menambah referensi Pemda dalam memberikan kebijakan untuk mengalokasikan BM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). *Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan*.
- Abimayu, A. (2005). Analisis VAR Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Ardhani, P., & Ardiyanto, M. D. (2011). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN : 2302-8912 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMU NUD.2018.v7.i03.p05>
- Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28.
- Indonesia, P. R. (19). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- JAENI, Jaeni, et al. PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BANTUAN PROPINSI TERHADAP BELANJAMODAL. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2017, 5.1.
- Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 79-92
- Jiwatami, S. (2013). Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Maqin, A. (2014). Pengaruh Kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa barat. *Trikonomika Journal*, 10(1), 10-18.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyani, Sri, and Akt Atwal Arifin. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada*

- Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015*). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal
- Pertarna, S. M., Tsanawiyah, M., Atas, S. M., & Aliyah, M. (33). Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Putro, N. S., & Pamudji, S. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*.
- Situngkir, A. (2009). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemko/pemkab sumatera utara (Master's thesis)*.
- Some, I. M. Arbie. A., & Payu. CS (2013). *Pengaruh Penggunaan Macromedia Flash Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fisika*.
- Sularno, F. M. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja ModaL Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124-142.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008–2010) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- Yustikasari, Y. Darwanto. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Kritis: Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta*.